



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG**

Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Telp: (0717) 9111513. Website: ptun-pangkalpinang.go.id. e-Mail: info@ptun-pangkalpinang.go.id

Pangkalpinang, 2 Oktober 2023

Nomor : W5-TUN.5/607/PAN.02/HK2.7/X/2023

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Laporan Indeks Persepsi Anti Korupsi

Periode Juli s.d. September 2023

Kepada Yth :

Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang

Di - Palembang

Dengan hormat,

Menindaklanjuti pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, maka kami kirimkan Laporan Indeks Persepsi Anti Korupsi periode Periode Juli s.d. September 2023 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang.

Demikian laporan ini dibuat, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

KETUA, 


ABDULLAH RIZIKI ARDIANSYAH, S.H., M.H.
NIP. 19750117 199403 1 001

Tembusan: Disampaikan kepada Yth;

1. Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara di - Jakarta
2. Arsip.

LAPORAN
SURVEI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI (IPAK)
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
PERIODE JULI S.D. SEPTEMBER
TAHUN 2023

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI (IPAK) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

Berdasarkan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan dan Evaluasi
Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi
Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah

Disahkan di Pangkalpinang

Pada hari Jumat, 29 September 2023

Ketua PTUN Pangkalpinang , /



ABDULLAH RIZIKI ARDIYANSYAH, S.H., M.I
NIP. 19750117 199403 1 001

Sekretaris Tim Survei,

A handwritten signature in black ink, likely belonging to Asmanidar, S.H., is written above the printed name.

ASMANIDAR, S.H.
NIP. 19690403 199203 2 002

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Pemerintah sangat membutuhkan informasi dari unit pelayanan instansi pemerintah secara rutin, dengan harapan mampu memberikan gambaran mengenai Indeks Persepsi Korupsi di instansi pemerintah kepada masyarakat, oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang mengadakan survei ini. Survei ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.

Survei ini menanyakan pendapat masyarakat mengenai persepsi korupsi dalam memperoleh pelayanan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, yang diambil dengan kuesioner.

Pelaksanaan survei dan laporannya ini, tentunya masih banyak kekurangan sehingga masih perlu perbaikan-perbaikan ke depan agar lebih baik. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun senantiasa kami terima. Semoga laporan ringkas ini, berguna bagi berbagai pihak, khususnya segenap jajaran pimpinan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dan masyarakat pengguna layanan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pangkalpinang, 29 September 2023

Sekretaris Tim Survei,



ASMANIDAR, S.H.
NIP. 19690403 199203 2 002

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GRAFIK.....	iv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1.Latar Belakang	1
1.2.Maksud Dan Tujuan	2
1.3.Landasan Hukum	2
1.4.Rencana Kerja.....	2
BAB II	4
METODOLOGI	4
2.1. Metode Penelitian	4
2.2. Populasi Dan Sampel	4
2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis.....	4
2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control.....	5
2.5. Teknik Analisis Data	5
2.6. Tahapan pelaksanaan	6
BAB III	8
INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI	8
3.1.Profil Responden	8
3.2.Indeks Persepsi Anti Korupsi Per Indikator.....	12
3.3.Indeks Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja pada pengadilan.....	22
3.4. Persepsi Responden Terhadap Kualitas Pelayanan Satuan Kerja pada Pengadilan.....	24
BAB IV	25
PENUTUP	25
4.1.Kesimpulan.....	25
4.2.Rekomendasi.....	25
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Model alur penyusunan survei IPAK menuju Zona Integritas	6
Tabel 2. Ruang lingkup survei Indeks Persepsi Anti Korupsi	6
Tabel 3. Nilai Persepsi.....	7
Tabel 4. Tingkat Pendidikan Responden	8
Tabel 5. Jenis Pekerjaan Responden	9
Tabel 6. Domisili Responden	10
Tabel 7. Rentang Usia Responden	11
Tabel 8. Indeks pada Koordinator Manipulasi Peraturan.....	12
Tabel 9. Indeks pada Penyalahgunaan Jabatan.....	12
Tabel 10. Indeks pada Indikator Menjual Pengaruh	13
Tabel 11. Indeks pada Indikator Transaksi biaya.....	14
Tabel 12. Indeks pada Indikator Tambahan Biaya	15
Tabel 13. Indeks pada Indikator Hadiah	16
Tabel 14. Indeks pada Indikator Transparansi Pembayaran	17
Tabel 15. Indeks pada Indikator Percaloan	18
Tabel 16. Indeks pada Indikator Perbuatan Curang	19
Tabel 17. indeks pada indikator Transaksi Rahasia	20
Tabel 18. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang	21
Tabel 19. Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang	22

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Tingkat Pendidikan Responden.....	8
Grafik 2. Jenis Pekerjaan Responden.....	9
Grafik 3. Domisili Responden.....	10
Grafik 4. Rentang Usia Responden.....	11
Grafik 5. Manipulasi Peraturan.....	12
Grafik 6. Penyalahgunaan Jabatan.....	13
Grafik 7. Menjual Pengaruh.....	14
Grafik 8. Transaksi Biaya.....	15
Grafik 9. Tambahan Biaya.....	16
Grafik 10. Hadiah.....	17
Grafik 11. Transparansi Pembayaran.....	18
Grafik 12. Percaloan.....	19
Grafik 13. Perbuatan Curang.....	20
Grafik 14. Transaksi Rahasia.....	21
Grafik 15. Indeks Persepsi Korupsi.....	22

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 serta mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani. Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang besar.

Pengadilan tingkat pertama yang akan ditetapkan oleh Pengadilan tingkat banding untuk menjadi lokasi *Pilot Project* menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya.

ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

1.2. Maksud Dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Indeks Persepsi Korupsi pada pengadilan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Indeks Survei Persepsi Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

1.3. Landasan Hukum

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- e) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.
- f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.

1.4. Rencana Kerja

1.4.1. Persiapan

Sebelum melaksanakan survei persepsi korupsi beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut.

- Penetapan Pelaksana

Dilaksanakan Sendiri, survei dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan sumber daya manusia yang dimilikinya

- Penyiapan Bahan
 - a. Kuesioner.
 - b. Bagian dari Kuesioner/Pengantar
 - c. Kelengkapan peralatan.
 - Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data
 - a. Jumlah Responden.
 - b. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data.
 - Penyusunan Jadwal
- Penyusunan rencana dan pelaksanaan survei dilakukan.

1.4.2. Pelaksanaan Pengumpulan Data

- Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner.
- Pengisian Kuesioner oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan.
- Pengujian kualitas dan validitas data.
- Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

1.4.3. Metode Survei

Survei dilaksanakan dalam interval waktu per 3 (tiga) bulan/ triwulan (4 kali dalam satu tahun).

BAB II

METODOLOGI

2.1. Metode Penelitian

Penelitian Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut. Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

2.2. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja pengadilan. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survei dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang ditemui itu cocok sebagai sumber data.

2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang. Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus penelitian dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di pengadilan.

2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang diisi tanpa wawancara. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu 3 (tiga) bulan atau data minimal 9 (sembilan) responden. Selanjutnya data dikumpulkan oleh petugas pelaksana yang dibekali dengan pelatihan. Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh pengawas (Wakil Ketua Pengadilan).

Wakil Ketua Pengadilan akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, membagikan dan mengumpulkan kuesioner, meneliti kuesioner, serta sekaligus memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara tepat oleh petugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan survei IPK.

2.5. Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan indeks korupsi menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 - 4. Dimana nilai 1 (satu) merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 (empat) merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani. Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring / angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan indeks persepsi korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya.

Teknik analisis perhitungan pada kuesioner indeks korupsi dilakukan sebagai berikut :

Pertama, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini.

Kedua, mencari bobot rata-rata setiap indikator.

Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100.

Skala indeks persepsi korupsi antara 1 – 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI.

2.6. Tahapan pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan *tools* untuk survei persepsi korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini :

Tabel 1. Model alur penyusunan survei IPAK menuju Zona Integritas



Tabel. 2 Ruang lingkup survei Indeks Anti Presepsi Korupsi

No	Ruang lingkup
1	Manipulasi Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transaksi Biaya
5	Biaya Tambahan
6	Hadiah
7	Transparansi Pembayaran
8	Percaloan
9	Perbuatan Curang
10	Transaksi Rahasia

Tabel. 3 Nilai Persepsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPAK	Mutu	Kinerja
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 2.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

BAB III

INDEKS PERSEPSI KORUPSI

3.1. Profil Responden

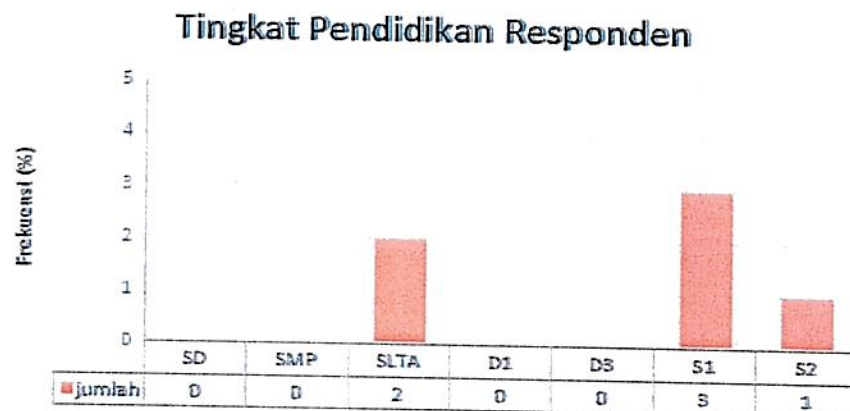
3.1.1. Tingkat Pendidikan Responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan diperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan pengakses layanan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang mayoritas memiliki latar belakang pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Tinggi.

Tabel 4. Tingkat Pendidikan Responden

No.	Jenis pendidikan	Frekuensi	
		Jumlah	%
1.	Tidak sekolah	-	-
2.	SD	-	-
3.	SMP	-	-
4.	SMA	2	33,3
5.	DIPLOMA	-	-
6.	S1	3	50
7.	S2	1	16,7
Jumlah		6	100

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini :



Grafik 1. Tingkat Pendidikan Responden

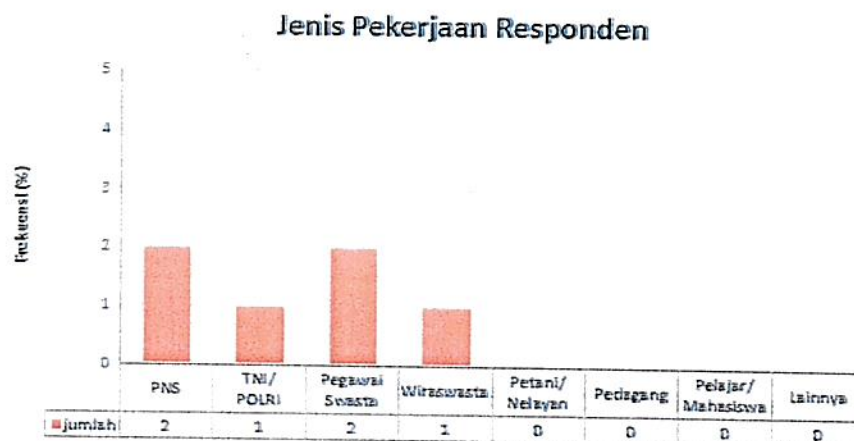
3.1.2. Pekerjaan Responden

Dari data jenis pekerjaan responden yang terkumpul berdasarkan survei Indeks Persepsi Korupsi periode Bulan Juli-September Triwulan III 2023 menunjukkan bahwa sebesar 33,3% responden pengguna layanan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang memiliki pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Swasta.

Tabel 5. Jenis Pekerjaan Responden

No.	Jenis Pekerjaan	Frekuensi	
		Jumlah	%
1.	Pegawai Negeri Sipil	2	33,3%
2.	TNI/POLRI	1	16,7%
3.	Pegawai Swasta	2	33,3%
4.	Wiraswasta	1	16,7%
5.	Petani/Nelayan	-	-
6.	Pedagang	-	-
7.	Pelajar/Mahasiswa	-	-
8.	Lainnya	-	-
Jumlah		6	100

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini :



Grafik 2. Jenis Pekerjaan Responden

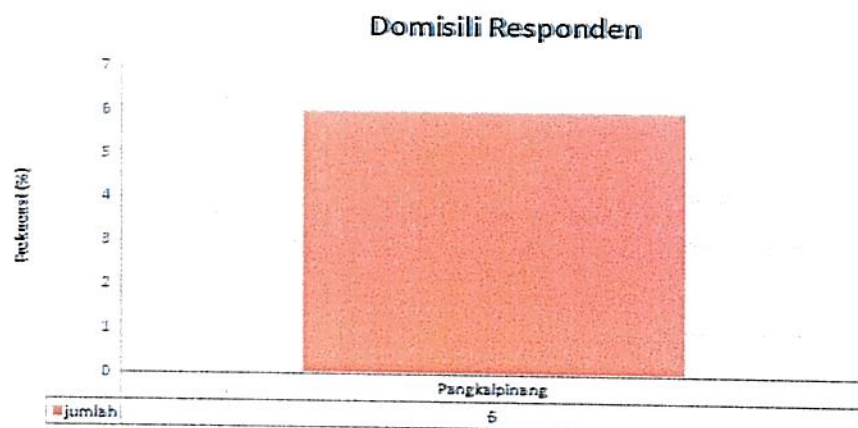
3.1.3. Domisili Responden

Dari data yang terkumpul selama periode survei Indeks Persepsi Korupsi Bulan Juli-September Triwulan III 2023 diperoleh data bahwa pengguna layanan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang berdasarkan domisili 100% berasal dari kota Pangkalpinang.

Tabel 6. Domisili Responden

No.	Domisili	Frekuensi	
		Jumlah	%
1.	Pangkalpinang	4	100
Jumlah		4	100

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini :



Grafik 3. Domisili Responden

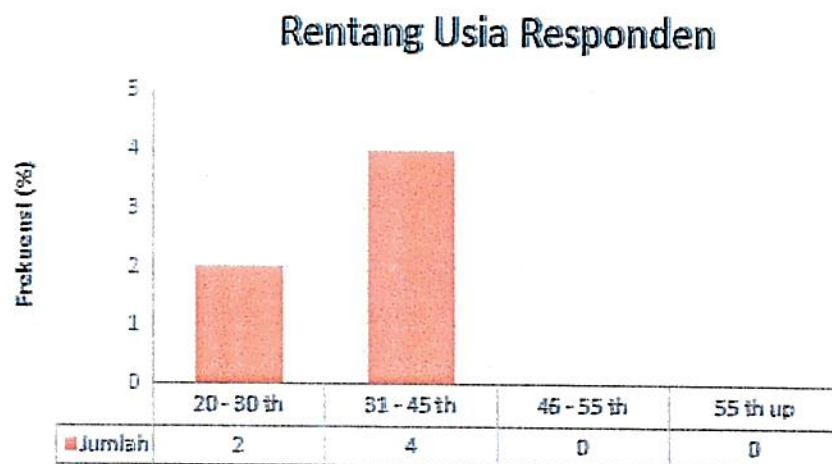
3.1.4. Kelompok Usia Responden

Sementara itu jika melihat responden pengguna layanan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang berdasarkan kelompok usia menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan berada dalam kelompok usia produktif yaitu pada usia antara 20-45 tahun dan tidak ada responden pada kelompok usia di atas 46 tahun.

Tabel 7. Usia Responden

No.	Jenis Pekerjaan	Frekuensi	
		Jumlah	%
1.	20 - 30 th	2	33,3
2.	31 - 45 th	4	66,7
3.	46 - 55 th	0	0
4.	55 th up	0	0
Jumlah		6	100

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini :



Grafik 4. Rentang Usia Responden

3.2. Indeks Persepsi Korupsi Per Koordinator

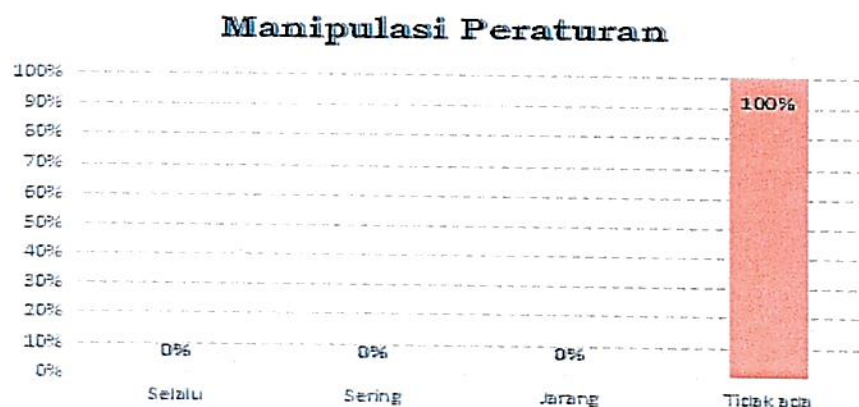
3.2.1. Indikator Manipulasi Peraturan

Dari data yang terkumpul selama periode survei Indeks Persepsi Korupsi Bulan Juli-September Triwulan III 2023 diperoleh data dari skala 1 sampai 4 hasil persepsi responden Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada indeks 4,00. Berdasarkan hasil Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang bersih dari Korupsi.

Tabel 8. Indeks Pada Koordinator Manipulasi Peraturan

No.	Jenis Pekerjaan	Frekuensi	
		Jumlah	%
1.	Selalu	0	0
2.	Sering	0	0
3.	Jarang	0	0
4.	Tidak ada	6	100
Jumlah		6	100

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini :



Grafik 5. Manipulasi Peraturan

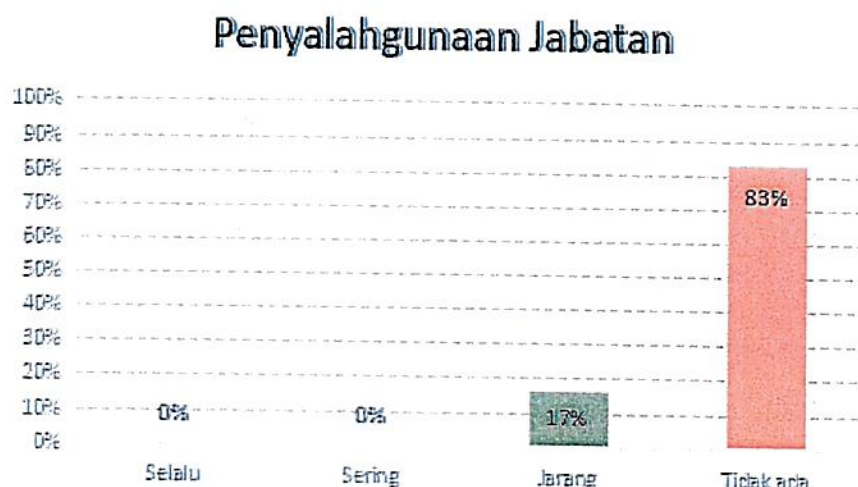
3.2.2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Penyalahgunaan Jabatan menunjukkan hasil pada indeks 3,83. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang bersih dari Korupsi.

Tabel 9. Indeks Pada Penyalahgunaan Jabatan

No.	Jenis Pekerjaan	Frekuensi	
		Jumlah	%
1.	Selalu	0	0
2.	Sering	0	0
3.	Jarang	1	16,67
4.	Tidak ada	5	83,33
Jumlah		6	100

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini :



Grafik 6. Penyalahgunaan Jabatan

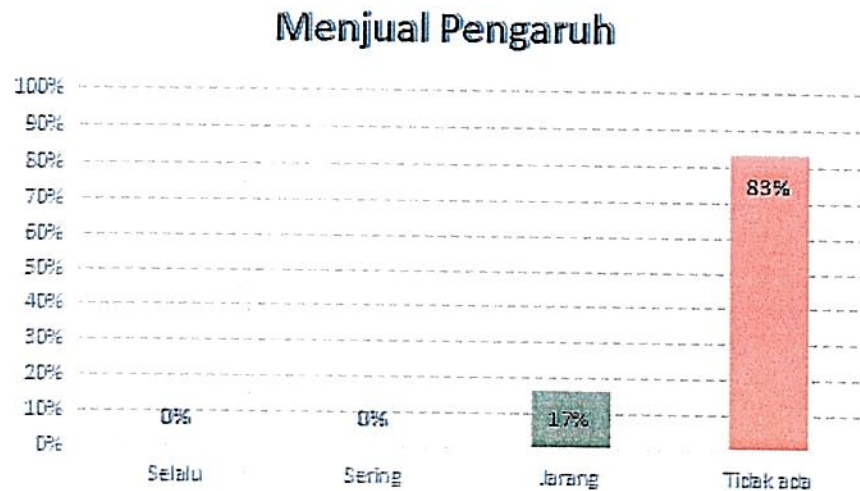
3.2.3. Koordinator Menjual Pengaruh

Dari data yang terkumpul selama periode survei Indeks Persepsi Korupsi Bulan Juli-September Triwulan III 2023 diperoleh data skala 1 sampai 4 hasil persepsi responden pada indikator Menjual Pengaruh menunjukkan hasil pada indeks 3,83. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang bersih dari Korupsi.

Tabel 10. Indeks Pada Koordinator Menjual Pengaruh

No.	Jenis Pekerjaan	Frekuensi	
		Jumlah	%
1.	Selalu	0	0
2.	Sering	0	0
3.	Jarang	1	16,67
4.	Tidak ada	5	83,33
Jumlah		6	100

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini :



Grafik 7. Menjual Pengaruh

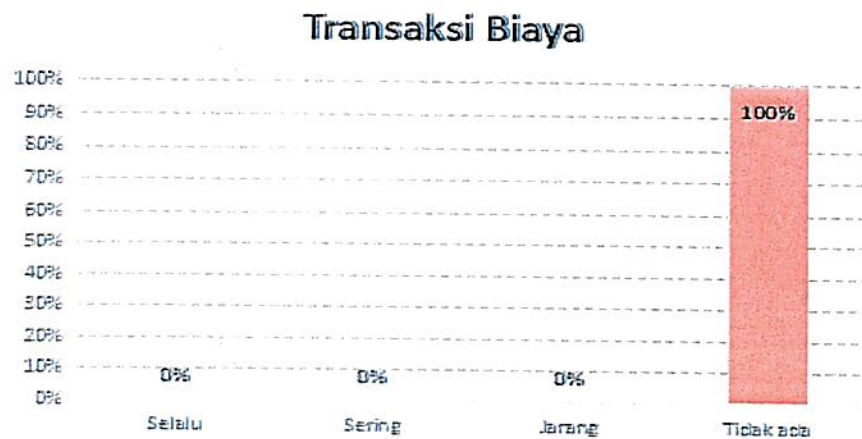
3.2.4. Indikator Transaksi Biaya

Dari data yang terkumpul selama periode survei Indeks Persepsi Korupsi Bulan Juli-September Triwulan III 2023 diperoleh data dari skala 1 sampai 4 hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Biaya ini menunjukkan hasil pada indeks 4,00. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang bersih dari Korupsi.

Tabel 11. Indeks Pada Indikator Transaksi Biaya

No.	Jenis Pekerjaan	Frekuensi	
		Jumlah	%
1.	Selalu	0	0
2.	Sering	0	0
3.	Jarang	0	0
4.	Tidak ada	6	100
Jumlah		6	100

Berdasarkan tabel di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



Grafik 8. Transaksi Biaya

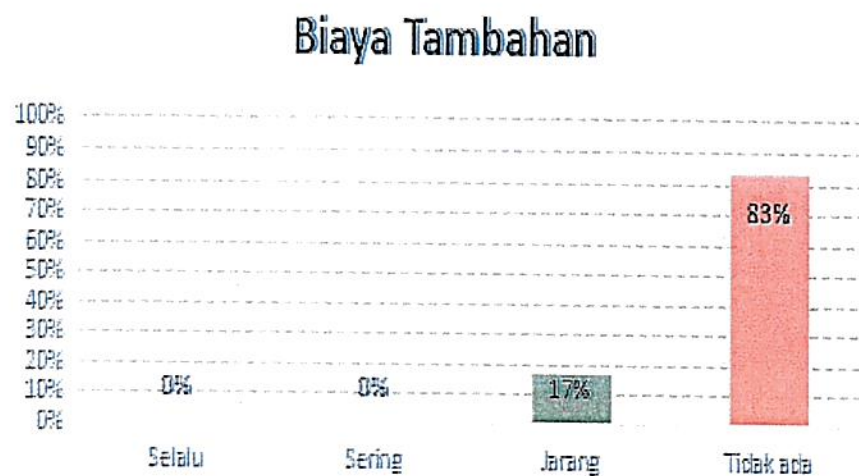
3.2.5. Koordinator Biaya Tambahan

Dari skala 1 sampai 4 hasil persepsi responden pada indikator Biaya Tambahan ini menunjukkan hasil pada indeks 3,83. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang bersih dari korupsi.

Tabel 12. Indeks Pada Indikator Biaya Tambahan

No.	Jenis Pekerjaan	Frekuensi	
		Jumlah	%
1.	Selalu	0	0
2.	Sering	0	0
3.	Jarang	1	16,67
4.	Tidak ada	5	83,33
Jumlah		6	100

Berdasarkan tabel Indeks Pada Indikator Biaya Tambahan tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini :



Grafik 9. Biaya Tambahan

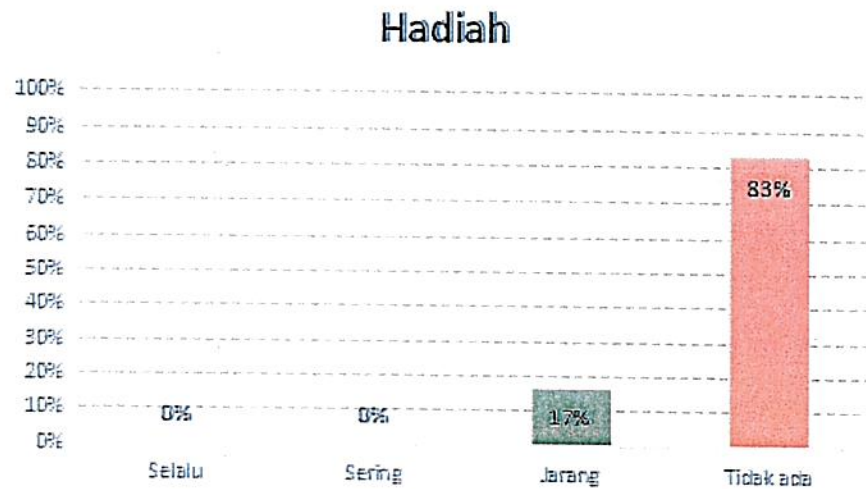
3.2.6. Indikator Hadiah

Dari data yang terkumpul selama periode survei Indeks Persepsi Korupsi Bulan Juli-September Triwulan III 2023 diperoleh data dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Hadiah ini menunjukkan hasil pada indeks 3,83. Berdasarkan indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang bersih dari Korupsi.

Tabel 13. Indeks Pada Indikator Hadiah

No.	Jenis Pekerjaan	Frekuensi	
		Jumlah	%
1.	Selalu	0	0
2.	Sering	0	0
3.	Jarang	1	16,67
4.	Tidak ada	5	83,33
Jumlah		6	100

Berdasarkan tabel Indeks Pada Indikator Hadiah di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini :



Grafik 10. Hadiah

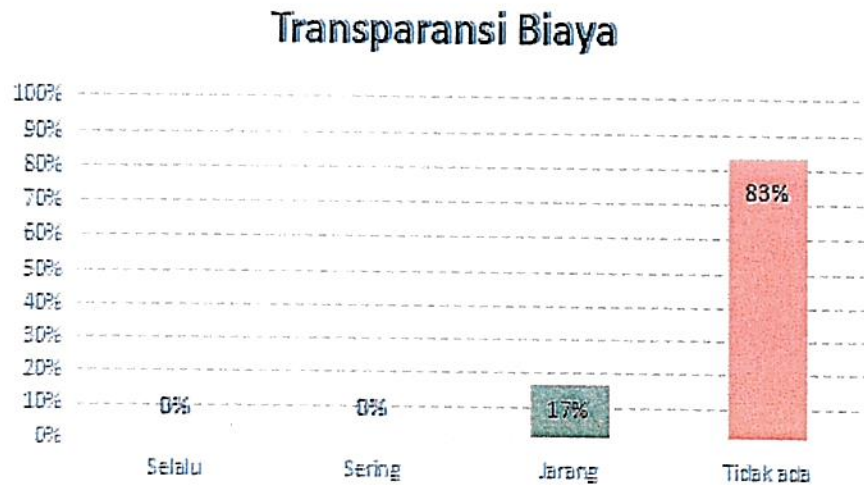
3.2.7. Indikator Transparansi Pembayaran

Dari data yang terkumpul selama periode survei Indeks Persepsi Korupsi Bulan Juli-September Triwulan III 2023 diperoleh data dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Pembayaran ini menunjukkan hasil pada indeks 3,83. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang telah transparan terhadap pembayaran.

Tabel 14. Indeks Pada Indikator Transparansi Pembayaran

No.	Jenis Pekerjaan	Frekuensi	
		Jumlah	%
1.	Selalu	0	0
2.	Sering	0	0
3.	Jarang	1	16,67
4.	Tidak ada	5	83,33
Jumlah		6	100

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini :



Grafik 11. Transparansi Pembayaran

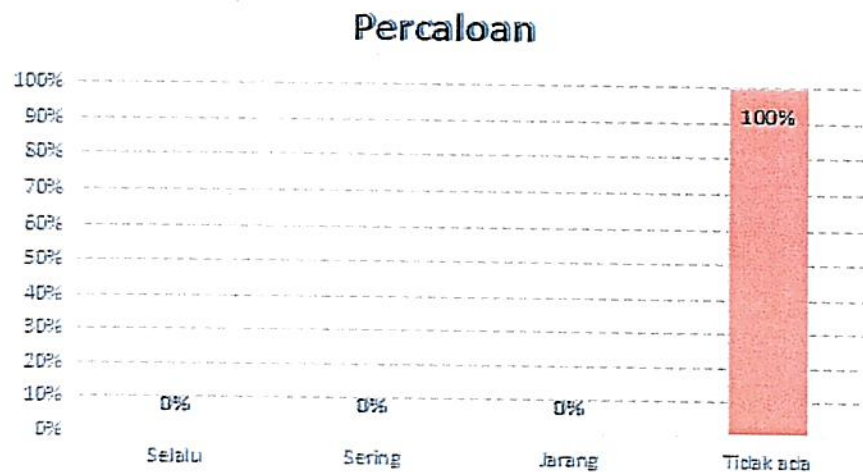
3.2.8. Indikator Percaloan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Percaloan ini menunjukkan hasil pada indeks 4,00. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang bersih dari tindakan Percaloan.

Tabel 15. Indeks Pada Indikator Percaloan

No.	Jenis Pekerjaan	Frekuensi	
		Jumlah	%
1.	Selalu	0	0
2.	Sering	0	0
3.	Jarang	0	0
4.	Tidak ada	6	100
Jumlah		6	100

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini :



Grafik 12. Percaloan

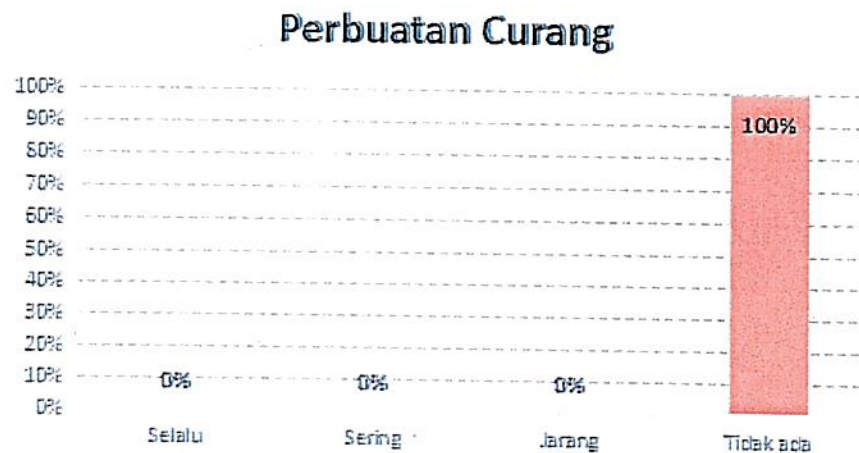
3.2.9. Indikator Perbuatan Curang

Dari data yang terkumpul selama periode survei Indeks Persepsi Korupsi Bulan Juli-September Triwulan III 2023 diperoleh data dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Perbuatan Curang ini menunjukkan hasil indeks 4,00. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja inerja Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang bersih dari Perbuatan Curang.

Tabel 16. Indeks Pada Indikator Perbuatan Curang

No.	Jenis Pekerjaan	Frekuensi	
		Jumlah	%
1.	Selalu	0	0
2.	Sering	0	0
3.	Jarang	0	0
4.	Tidak ada	6	100
Jumlah		6	100

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini :



Grafik 13. Perbuatan Curang

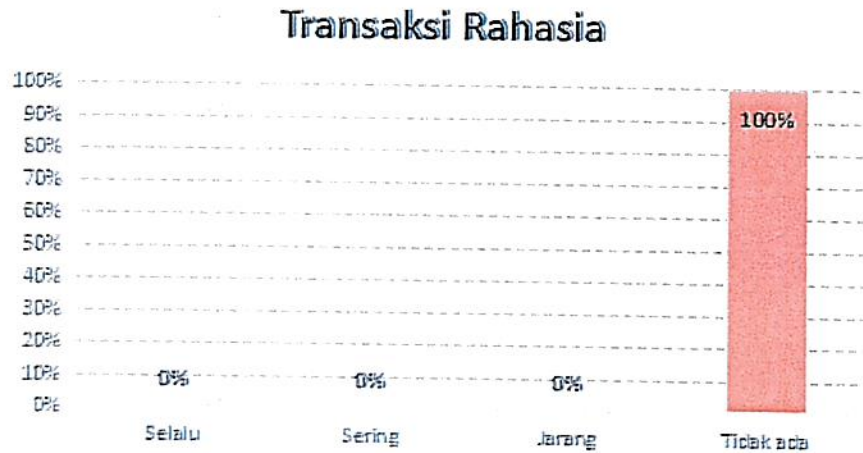
3.2.10. Indikator Transaksi Rahasia

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Rahasia ini menunjukkan hasil pada indeks 4,00. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang bersih dari Korupsi.

Tabel 17. Indeks Pada Indikator Transaksi Rahasia

No.	Jenis Pekerjaan	Frekuensi	
		Jumlah	%
1.	Selalu	0	0
2.	Sering	0	0
3.	Jarang	0	0
4.	Tidak ada	6	100
Jumlah		6	100

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini :



Grafik 14. Transaksi Rahasia

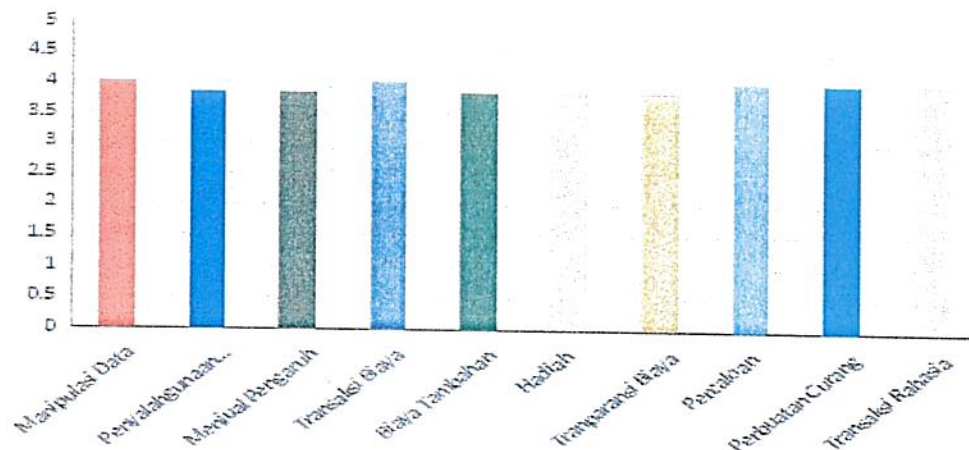
3.3. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja Pada Pengadilan

Dari 10 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang sebesar 3,92.

Tabel 18. Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang

Indikator	Unsur Pertanyaan	Nilai Rata-Rata
Q 1	Manipulasi Data	4,00
Q 2	Penyalahgunaan Jabatan	3,83
Q 3	Menjual Pengaruh	3,83
Q 4	Transaksi Biaya	4,00
Q 5	Biaya Tambahan	3,83
Q 6	Hadiah	3,83
Q 7	Tranparansi Biaya	3,83
Q 8	Percaloan	4,00
Q 9	Perbuatan Curang	4,00
Q 10	Transaksi Rahasia	4,00
Jumlah		3,92

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini :



Grafik 15. Indeks Persepsi Korupsi

Indeks 3,92 jika dikonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan BERSIH DARI KORUPSI. Nilai interval konversi Indeks Persepsi Korupsi berada pada angka 81,26 – 100.

Tabel 19. Persepsi Korupsi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI IPK	MUT U	KINERJA
1	1.00 – 1.75	25.00 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 2.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

3.4. Persepsi Responden Terhadap Kualitas Pelayanan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang

Selain memberikan output skor Indeks Persepsi Korupsi, survei yang dilakukan ini juga menjangkau masukan dari responden berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir celah Korupsi di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari hasil survei Persepsi Korupsi yang telah dilakukan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang diperoleh informasi bahwa pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang memiliki Indeks Persepsi Korupsi 3,92 atau masuk pada kategori bersih dari korupsi.

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

1. Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks 4,00.
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks 3,83.
3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks 3,83.
4. Indikator Transaksi Biaya, mendapat indeks 4,00.
5. Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks 3,83.
6. Indikator Hadiah, mendapat indeks 3,83.
7. Indikator Transparansi Pembayaran, mendapat indeks 3,83.
8. Indikator Percaloan, mendapat indeks 4,00.
9. Indikator Perbuatan Curang, mendapat indeks 4,00.
10. Indikator Transaksi Rahasia mendapat Indeks 4,00.

4.2. Rekomendasi

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2023 tersebut di atas, menunjukkan bahwa mayoritas indikator memiliki indeks di atas 3,8 atau masuk pada persepsi bersih dari korupsi.

LAMPIRAN - LAMPIRAN



**KUESIONER SURVEI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
Tahun 2023**

Nomor kuesioner : (diisi oleh petugas)

IDENTITAS RESPONDEN :

1.	Nama	:	ADITYA PRATAMA PO
2.	Instansi/Perusahaan	:	-
3.	No. Hp.	:	082185772899
4.	Alamat e-Mail	:	ad3059867@gmail.com
5.	Umur (tahun)	:	21 TAHUN
6.	Jenis Kelamin	:	Laki - Laki
7.	Pendidikan terakhir	:	S1
8.	Pekerjaan Utama	:	MANTAN ANGGOTA POLRI
9.	Domisili	:	PANGKAL PINANG

Jenis Pelayanan :

PETUNJUK :

1. Mohon diisi sesuai dengan keadaan Bapak/Ibu/Saudara/(i) yang sebenarnya, karena hal ini tidak mempengaruhi kondisi maupun pelayanan terhadap Bapak/Ibu/Saudara/(i) dan betul-betul untuk kepentingan ilmiah.
2. Cara Pengisian Kuesioner :
Bapak/Ibu/Saudara/(i) memberi tanda centang (✓) atau silang (x) pada pilihan jawaban yang tersedia sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu/Saudara/(i)

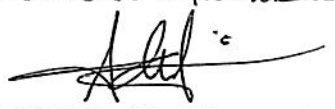
KUESIONER :

Pertanyaan-pertanyaan Survei	
Bagaimana pendapat Bapak/Ibu/Saudara/(i)	
Eksternal	
1.	Apakah pelayanan oleh petugas telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan, dan tidak dipersulit untuk maksud tertentu? (Manipulasi Peraturan) ☒ Selalu Sesuai Prosedur ☐ Sering Sesuai Prosedur ☐ Jarang Sesuai Prosedur ☐ Tidak Sesuai Prosedur
2.	Apakah Petugas dalam memberikan layanan pengadilan dilakukan secara cepat dan sederhana tanpa ada penawaran dari petugas untuk meminta imbalan tertentu? (Penyalahgunaan Jabatan) ☒ Petugas melayani tanpa meminta imbalan ☐ Petugas melayani jarang meminta imbalan ☐ Petugas melayani sering meminta imbalan ☐ Petugas melayani selalu meminta imbalan
3.	Apakah pernah dihubungi oleh seseorang (pegawai pengadilan) yang menjanjikan akan membantu dalam pengurusan surat/berkas perkara dengan meminta imbalan sesuatu? (Menjual Pengaruh) ☒ Tidak Pernah Dihubungi ☐ Jarang Dihubungi ☐ Sering Dihubungi ☐ Selalu Dihubungi
4.	Apakah informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan mudah diakses/diperoleh? (Transaksi Biaya) ☒ Selalu ☐ Sering ☐ Jarang ☐ Tidak Ada



5.	Apakah pembayaran biaya perkara sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan di luar ketentuan? (Biaya Tambahan) ☒ Tidak Ada Tambahan Biaya ☐ Jarang Ada Tambahan Biaya ☐ Sering Ada Tambahan Biaya ☐ Selalu Ada Tambahan Biaya
6.	Apakah petugas dengan tegas menolak setiap pemberian tanda terima kasih atas layanan yang diterima? (Hadiah) ☒ Selalu Menolak ☐ Sering Menolak ☐ Jarang Menolak ☐ Tidak Pernah Menolak
7.	Apakah menerima bukti transaksi keuangan/pembayaran yang sah setelah proses pembayaran dilakukan? (Transparasi Biaya) ☒ Selalu Menerima Bukti Transaksi ☐ Sering Menerima Bukti Transaksi ☐ Jarang Menerima Bukti Transaksi ☐ Tidak Ada Menerima Bukti Transaksi
8.	Apakah pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan layanan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang? (Percaloan) ☒ Tidak Ada ☐ Jarang ☐ Sering ☐ Selalu
9.	Apakah pernah melihat dan/atau mendengar masih terjadi praktek KKN di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang? (Perbuatan Curang) ☒ Tidak Pernah ☐ Jarang ☐ Sering ☐ Selalu
10.	Apakah pernah mengurus perkara melalui Hakim/Panitera/Staff Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang diluar persidangan atau di luar prosedur? (Transaksi Rahasia) ☒ Tidak Ada ☐ Jarang ☐ Sering ☐ Selalu

Pangkalpinang, 06 September 2023


(Anora Brachma P.)



**KUESIONER SURVEI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
Tahun 2023**

Nomor kuesioner : (diisi oleh petugas)

IDENTITAS RESPONDEN :

1.	Nama	:	Helinda Atika
2.	Instansi/Perusahaan	:	
3.	No. Hp.	:	081367558776
4.	Alamat e-Mail	:	helinda.atika@gmail.com
5.	Umur (tahun)	:	45 th
6.	Jenis Kelamin	:	Pemampuan
7.	Pendidikan terakhir	:	S1
8.	Pekerjaan Utama	:	pengacara
9.	Domisili	:	pangkalpinang

Jenis Pelayanan :

PETUNJUK :

1. Mohon diisi sesuai dengan keadaan Bapak/Ibu/Saudara/(i) yang sebenarnya, karena hal ini tidak mempengaruhi kondisi maupun pelayanan terhadap Bapak/Ibu/Saudara/(i) dan betul-betul untuk kepentingan ilmiah.
2. Cara Pengisian Kuesioner :
Bapak/Ibu/Saudara/(i) memberi tanda centang (✓) atau silang (×) pada pilihan jawaban yang tersedia sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu/Saudara/(i)

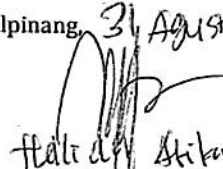
KUESIONER :

Pertanyaan-pertanyaan Survei	
Bagaimana pendapat Bapak/Ibu/Saudara/(i)	
Eksternal	
1.	Apakah pelayanan oleh petugas telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan, dan tidak dipersulit untuk maksud tertentu? (Manipulasi Peraturan) ☒ Selalu Sesuai Prosedur ☐ Sering Sesuai Prosedur ☐ Jarang Sesuai Prosedur ☐ Tidak Sesuai Prosedur
2.	Apakah Petugas dalam memberikan layanan pengadilan dilakukan secara cepat dan sederhana tanpa ada penawaran dari petugas untuk meminta imbalan tertentu? (Penyalahgunaan Jabatan) ☒ Petugas melayani tanpa meminta imbalan ☐ Petugas melayani jarang meminta imbalan ☐ Petugas melayani sering meminta imbalan ☐ Petugas melayani selalu meminta imbalan
3.	Apakah pernah dihubungi oleh seseorang (pegawai pengadilan) yang menjanjikan akan membantu dalam pengurusan surat/berkas perkara dengan meminta imbalan sesuatu? (Menjual Pengaruh) ☒ Tidak Pernah Dihubungi ☐ Jarang Dihubungi ☐ Sering Dihubungi ☐ Selalu Dihubungi
4.	Apakah informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan mudah diakses/diperoleh? (Transaksi Biaya) ☒ Selalu ☐ Sering ☐ Jarang ☐ Tidak Ada



5.	Apakah pembayaran biaya perkara sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan di luar ketentuan? (Biaya Tambahan) ☐ Tidak Ada Tambahan Biaya ☒ Jarang Ada Tambahan Biaya ☐ Sering Ada Tambahan Biaya ☐ Selalu Ada Tambahan Biaya
6.	Apakah petugas dengan tegas menolak setiap pemberian tanda terima kasih atas layanan yang diterima? (Hadiah) ☒ Selalu Menolak ☐ Sering Menolak ☐ Jarang Menolak ☐ Tidak Pernah Menolak
7.	Apakah menerima bukti transaksi keuangan/pembayaran yang sah setelah proses pembayaran dilakukan? (Transparasi Biaya) ☒ Selalu Menerima Bukti Transaksi ☐ Sering Menerima Bukti Transaksi ☐ Jarang Menerima Bukti Transaksi ☐ Tidak Ada Menerima Bukti Transaksi
8.	Apakah pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan layanan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang? (Percaloan) ☒ Tidak Ada ☐ Jarang ☐ Sering ☐ Selalu
9.	Apakah pernah melihat dan/atau mendengar masih terjadi praktek KKN di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang? (Perbuatan Curang) ☒ Tidak Pernah ☐ Jarang ☐ Sering ☐ Selalu
10.	Apakah pernah mengurus perkara melalui Hakim/Panitera/Staff Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang diluar persidangan atau di luar prosedur? (Transaksi Rahasia) ☒ Tidak Ada ☐ Jarang ☐ Sering ☐ Selalu

Pangkalpinang, 31 Agustus 2023


(Haldi Anstika S.H.)



**KUESIONER SURVEI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
Tahun 2023**

Nomor kuesioner : (diisi oleh petugas)

IDENTITAS RESPONDEN :

1.	Nama	:	SEPTEAN
2.	Instansi/Perusahaan	:	UBB
3.	No. Hp.	:	
4.	Alamat e-Mail	:	
5.	Umur (tahun)	:	31
6.	Jenis Kelamin	:	Laki-laki
7.	Pendidikan terakhir	:	SI
8.	Pekerjaan Utama	:	PKS
9.	Domisili	:	PKP

Jenis Pelayanan :

PETUNJUK :

1. Mohon diisi sesuai dengan keadaan Bapak/Ibu/Saudara/(i) yang sebenarnya, karena hal ini tidak mempengaruhi kondisi maupun pelayanan terhadap Bapak/Ibu/Saudara/(i) dan betul-betul untuk kepentingan ilmiah.
2. Cara Pengisian Kuesioner :
Bapak/Ibu/Saudara/(i) memberi tanda centang (✓) atau silang (×) pada pilihan jawaban yang tersedia sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu/Saudara/(i)

KUESIONER :

Pertanyaan-pertanyaan Survei	
Bagaimana pendapat Bapak/Ibu/Saudara/(i)	
Eksternal	
1.	Apakah pelayanan oleh petugas telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan, dan tidak dipersulit untuk maksud tertentu? (Manipulasi Peraturan) ☒ Selalu Sesuai Prosedur ☐ Sering Sesuai Prosedur ☐ Jarang Sesuai Prosedur ☐ Tidak Sesuai Prosedur
2.	Apakah Petugas dalam memberikan layanan pengadilan dilakukan secara cepat dan sederhana tanpa ada penawaran dari petugas untuk meminta imbalan tertentu? (Penyalahgunaan Jabatan) ☒ Petugas melayani tanpa meminta imbalan ☐ Petugas melayani jarang meminta imbalan ☐ Petugas melayani sering meminta imbalan ☐ Petugas melayani selalu meminta imbalan
3.	Apakah pernah dihubungi oleh seseorang (pegawai pengadilan) yang menjanjikan akan membantu dalam pengurusan surat/berkas perkara dengan meminta imbalan sesuatu? (Menjual Pengaruh) ☒ Tidak Pernah Dihubungi ☐ Jarang Dihubungi ☐ Sering Dihubungi ☐ Selalu Dihubungi
4.	Apakah informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan mudah diakses/diperoleh? (Transaksi Biaya) ☒ Selalu ☐ Sering ☐ Jarang ☐ Tidak Ada



5.	Apakah pembayaran biaya perkara sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan di luar ketentuan? (Biaya Tambahan) ☒ Tidak Ada Tambahan Biaya ☐ Jarang Ada Tambahan Biaya ☐ Sering Ada Tambahan Biaya ☐ Selalu Ada Tambahan Biaya
6.	Apakah petugas dengan tegas menolak setiap pemberian tanda terima kasih atas layanan yang diterima? (Hadiah) ☒ Selalu Menolak ☐ Sering Menolak ☐ Jarang Menolak ☐ Tidak Pernah Menolak
7.	Apakah menerima bukti transaksi keuangan/pembayaran yang sah setelah proses pembayaran dilakukan? (Transparasi Biaya) ☒ Selalu Menerima Bukti Transaksi ☐ Sering Menerima Bukti Transaksi ☐ Jarang Menerima Bukti Transaksi ☐ Tidak Ada Menerima Bukti Transaksi
8.	Apakah pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan layanan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang? (Percaloan) ☒ Tidak Ada ☐ Jarang ☐ Sering ☐ Selalu
9.	Apakah pernah melihat dan/atau mendengar masih terjadi praktek KKN di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang? (Perbuatan Curang) ☒ Tidak Pernah ☐ Jarang ☐ Sering ☐ Selalu
10.	Apakah pernah mengurus perkara melalui Hakim/Panitera/Staff Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang diluar persidangan atau di luar prosedur? (Transaksi Rahasia) ☒ Tidak Ada ☐ Jarang ☐ Sering ☐ Selalu

Pangkalpinang, 31 / 01 / 2023

(_____)



**KUESIONER SURVEI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
Tahun 2023**

Nomor kuesioner : (diisi oleh petugas)

IDENTITAS RESPONDEN :

1.	Nama	:	YUDHA
2.	Instansi/Perusahaan	:	POLRI
3.	No. Hp.	:	082321870806
4.	Alamat e-Mail	:	yudha@gmail.com
5.	Umur (tahun)	:	29
6.	Jenis Kelamin	:	Laki - Laki
7.	Pendidikan terakhir	:	SLTA
8.	Pekerjaan Utama	:	POLRI
9.	Domisili	:	Pangkalpinang

Jenis Pelayanan :

PETUNJUK :

1. Mohon diisi sesuai dengan keadaan Bapak/Ibu/Saudara/(i) yang sebenarnya, karena hal ini tidak mempengaruhi kondisi maupun pelayanan terhadap Bapak/Ibu/Saudara/(i) dan betul-betul untuk kepentingan ilmiah.
2. Cara Pengisian Kuesioner :
Bapak/Ibu/Saudara/(i) memberi tanda centang (✓) atau silang (×) pada pilihan jawaban yang tersedia sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu/Saudara/(i)

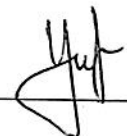
KUESIONER :

Pertanyaan-pertanyaan Survei	
Bagaimana pendapat Bapak/Ibu/Saudara/(i)	
Eksternal	
1.	Apakah pelayanan oleh petugas telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan, dan tidak dipersulit untuk maksud tertentu? (Manipulasi Peraturan) ☒ Selalu Sesuai Prosedur ☐ Sering Sesuai Prosedur ☐ Jarang Sesuai Prosedur ☐ Tidak Sesuai Prosedur
2.	Apakah Petugas dalam memberikan layanan pengadilan dilakukan secara cepat dan sederhana tanpa ada penawaran dari petugas untuk meminta imbalan tertentu? (Penyalahgunaan Jabatan) ☒ Petugas melayani tanpa meminta imbalan ☐ Petugas melayani jarang meminta imbalan ☐ Petugas melayani sering meminta imbalan ☐ Petugas melayani selalu meminta imbalan
3.	Apakah pernah dihubungi oleh seseorang (pegawai pengadilan) yang menjanjikan akan membantu dalam pengurusan surat/berkas perkara dengan meminta imbalan sesuatu? (Menjual Pengaruh) ☒ Tidak Pernah Dihubungi ☐ Jarang Dihubungi ☐ Sering Dihubungi ☐ Selalu Dihubungi
4.	Apakah informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan mudah diakses/diperoleh? (Transaksi Biaya) ☒ Selalu ☐ Sering ☐ Jarang ☐ Tidak Ada



5.	Apakah pembayaran biaya perkara sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan di luar ketentuan? (Biaya Tambahan) ☒ Tidak Ada Tambahan Biaya ☐ Jarang Ada Tambahan Biaya ☐ Sering Ada Tambahan Biaya ☐ Selalu Ada Tambahan Biaya
6.	Apakah petugas dengan tegas menolak setiap pemberian tanda terima kasih atas layanan yang diterima? (Hadiah) ☒ Selalu Menolak ☐ Sering Menolak ☐ Jarang Menolak ☐ Tidak Pernah Menolak
7.	Apakah menerima bukti transaksi keuangan/pembayaran yang sah setelah proses pembayaran dilakukan? (Transparasi Biaya) ☒ Selalu Menerima Bukti Transaksi ☐ Sering Menerima Bukti Transaksi ☐ Jarang Menerima Bukti Transaksi ☐ Tidak Ada Menerima Bukti Transaksi
8.	Apakah pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan layanan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang? (Percaloan) ☒ Tidak Ada ☐ Jarang ☐ Sering ☐ Selalu
9.	Apakah pernah melihat dan/atau mendengar masih terjadi praktek KKN di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang? (Perbuatan Curang) ☒ Tidak Pernah ☐ Jarang ☐ Sering ☐ Selalu
10.	Apakah pernah mengurus perkara melalui Hakim/Panitera/Staff Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang diluar persidangan atau di luar prosedur? (Transaksi Rahasia) ☒ Tidak Ada ☐ Jarang ☐ Sering ☐ Selalu

Pangkalpinang, 09 - 08. 2023

()



**KUESIONER SURVEI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
Tahun 2023**

Nomor kuesioner : (diisi oleh petugas)

IDENTITAS RESPONDEN :

1.	Nama	:	Ade Asmit
2.	Instansi/Perusahaan	:	UEB
3.	No. Hp.	:	083145012930
4.	Alamat e-Mail	:	adeasmit@ueb.ac.id
5.	Umur (tahun)	:	26
6.	Jenis Kelamin	:	Pria
7.	Pendidikan terakhir	:	S1
8.	Pekerjaan Utama	:	PRT
9.	Domisili	:	Pangkal

Jenis Pelayanan :

PETUNJUK :

1. Mohon diisi sesuai dengan keadaan Bapak/Ibu/Saudara/(i) yang sebenarnya, karena hal ini tidak mempengaruhi kondisi maupun pelayanan terhadap Bapak/Ibu/Saudara/(i) dan betul-betul untuk kepentingan ilmiah.
2. Cara Pengisian Kuesioner :
Bapak/Ibu/Saudara/(i) memberi tanda centang (✓) atau silang (×) pada pilihan jawaban yang tersedia sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu/Saudara/(i)

KUESIONER :

Pertanyaan-pertanyaan Survei	
Bagaimana pendapat Bapak/Ibu/Saudara/(i)	
Eksternal	
1.	Apakah pelayanan oleh petugas telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan, dan tidak dipersulit untuk maksud tertentu? (Manipulasi Peraturan) ☐ Selalu Sesuai Prosedur ☒ Sering Sesuai Prosedur ☐ Jarang Sesuai Prosedur ☐ Tidak Sesuai Prosedur
2.	Apakah Petugas dalam memberikan layanan pengadilan dilakukan secara cepat dan sederhana tanpa ada penawaran dari petugas untuk meminta imbalan tertentu? (Penyalahgunaan Jabatan) ☒ Petugas melayani tanpa meminta imbalan ☐ Petugas melayani jarang meminta imbalan ☐ Petugas melayani sering meminta imbalan ☐ Petugas melayani selalu meminta imbalan
3.	Apakah pernah dihubungi oleh seseorang (pegawai pengadilan) yang menjanjikan akan membantu dalam pengurusan surat/berkas perkara dengan meminta imbalan sesuatu? (Menjual Pengaruh) ☒ Tidak Pernah Dihubungi ☐ Jarang Dihubungi ☐ Sering Dihubungi ☐ Selalu Dihubungi
4.	Apakah informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan mudah diakses/diperoleh? (Transaksi Biaya) ☐ Selalu ☒ Sering ☐ Jarang ☐ Tidak Ada



5.	Apakah pembayaran biaya perkara sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan di luar ketentuan? (Biaya Tambahan) ☒ Tidak Ada Tambahan Biaya ☐ Jarang Ada Tambahan Biaya ☐ Sering Ada Tambahan Biaya ☐ Selalu Ada Tambahan Biaya
6.	Apakah petugas dengan tegas menolak setiap pemberian tanda terima kasih atas layanan yang diterima? (Hadiah) ☐ Selalu Menolak ☒ Sering Menolak ☐ Jarang Menolak ☐ Tidak Pernah Menolak
7.	Apakah menerima bukti transaksi keuangan/pembayaran yang sah setelah proses pembayaran dilakukan? (Transparasi Biaya) ☐ Selalu Menerima Bukti Transaksi ☒ Sering Menerima Bukti Transaksi ☐ Jarang Menerima Bukti Transaksi ☐ Tidak Ada Menerima Bukti Transaksi
8.	Apakah pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan layanan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang? (Percaloan) ☒ Tidak Ada ☐ Jarang ☐ Sering ☐ Selalu
9.	Apakah pernah melihat dan/atau mendengar masih terjadi praktek KKN di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang? (Perbuatan Curang) ☒ Tidak Pernah ☐ Jarang ☐ Sering ☐ Selalu
10.	Apakah pernah mengurus perkara melalui Hakim/Panitera/Staff Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang diluar persidangan atau di luar prosedur? (Transaksi Rahasia) ☒ Tidak Ada ☐ Jarang ☐ Sering ☐ Selalu

Pangkalpinang, 31-08-2023


(_____)



**KUESIONER SURVEI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
Tahun 2023**

Nomor kuesioner : (diisi oleh petugas)

IDENTITAS RESPONDEN :

1.	Nama	:	Kendra Hawan
2.	Instansi/Perusahaan	:	Advokat
3.	No. Hp.	:	081275 10 60 27
4.	Alamat e-Mail	:	nkawana@yahoo.co.id
5.	Umur (tahun)	:	43 tahun
6.	Jenis Kelamin	:	Laki-laki
7.	Pendidikan terakhir	:	S2
8.	Pekerjaan Utama	:	Advokat
9.	Domisili	:	Pangkalpinang

Jenis Pelayanan :

PETUNJUK :

1. Mohon diisi sesuai dengan keadaan Bapak/Ibu/Saudara/(i) yang sebenarnya, karena hal ini tidak mempengaruhi kondisi maupun pelayanan terhadap Bapak/Ibu/Saudara/(i) dan betul-betul untuk kepentingan ilmiah.
2. Cara Pengisian Kuesioner :
Bapak/Ibu/Saudara/(i) memberi tanda centang (✓) atau silang (×) pada pilihan jawaban yang tersedia sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu/Saudara/(i)

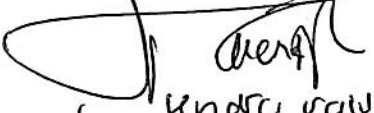
KUESIONER :

Pertanyaan-pertanyaan Survei	
Bagaimana pendapat Bapak/Ibu/Saudara/(i)	
Eksternal	
1.	Apakah pelayanan oleh petugas telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan, dan tidak dipersulit untuk maksud tertentu? (Manipulasi Peraturan) ☒ Selalu Sesuai Prosedur ☐ Sering Sesuai Prosedur ☐ Jarang Sesuai Prosedur ☐ Tidak Sesuai Prosedur
2.	Apakah Petugas dalam memberikan layanan pengadilan dilakukan secara cepat dan sederhana tanpa ada penawaran dari petugas untuk meminta imbalan tertentu? (Penyalahgunaan Jabatan) ☒ Petugas melayani tanpa meminta imbalan ☐ Petugas melayani jarang meminta imbalan ☐ Petugas melayani sering meminta imbalan ☐ Petugas melayani selalu meminta imbalan
3.	Apakah pernah dihubungi oleh seseorang (pegawai pengadilan) yang menjanjikan akan membantu dalam pengurusan surat/berkas perkara dengan meminta imbalan sesuatu? (Menjual Pengaruh) ☒ Tidak Pernah Dihubungi ☐ Jarang Dihubungi ☐ Sering Dihubungi ☐ Selalu Dihubungi
4.	Apakah informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan mudah diakses/diperoleh? (Transaksi Biaya) ☒ Selalu ☐ Sering ☐ Jarang ☐ Tidak Ada



5.	Apakah pembayaran biaya perkara sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan di luar ketentuan? (Biaya Tambahan) ☒ Tidak Ada Tambahan Biaya ☐ Jarang Ada Tambahan Biaya ☐ Sering Ada Tambahan Biaya ☐ Selalu Ada Tambahan Biaya
6.	Apakah petugas dengan tegas menolak setiap pemberian tanda terima kasih atas layanan yang diterima? (Hadiah) ☒ Selalu Menolak ☐ Sering Menolak ☐ Jarang Menolak ☐ Tidak Pernah Menolak
7.	Apakah menerima bukti transaksi keuangan/pembayaran yang sah setelah proses pembayaran dilakukan? (Transparasi Biaya) ☒ Selalu Menerima Bukti Transaksi ☐ Sering Menerima Bukti Transaksi ☐ Jarang Menerima Bukti Transaksi ☐ Tidak Ada Menerima Bukti Transaksi
8.	Apakah pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan layanan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang? (Percaloan) ☒ Tidak Ada ☐ Jarang ☐ Sering ☐ Selalu
9.	Apakah pernah melihat dan/atau mendengar masih terjadi praktek KKN di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang? (Perbuatan Curang) ☒ Tidak Pernah ☐ Jarang ☐ Sering ☐ Selalu
10.	Apakah pernah mengurus perkara melalui Hakim/Panitera/Staff Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang diluar persidangan atau di luar prosedur? (Transaksi Rahasia) ☒ Tidak Ada ☐ Jarang ☐ Sering ☐ Selalu

Pangkalpinang, 31 Agustus 2023


(Hendra Rawa)